

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KELEMBAGAAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Herlintati

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Lampung

ABSTRACT

Regional economic development is a change for the better, the economy that includes the establishment of new institutions, the development of alternative industries, improving the capacity of the existing workforce to produce products and services better, identifying new markets, transfer of knowledge knowledge and development of new businesses in order to improve the economic and social welfare.

The results showed that the capacity and participation of women in leadership positions who determine the policy / decision-economic development plans in the region is still relatively weak institutions, lack of access to women's involvement in the formulation of the program due to the composition of factors on the structural position of women in institutions, lack of knowledge, experience and capabilities of women in the formulation of program access, program establishment and implementation of economic development programs at the institutional center of Lampung regency.

Ability and women's participation in responding to proposals from the community in economic development in the institutional area in Lampung regency was still relatively limited. ability in response to the proposed program and budget of the subordinate financing in economic development is still relatively weak institutions. The low composition on the structural position of women in local institutions turned out to limit the access capability, authority and power of women to influence decisions in the formulation of the proposed policy. Women's ability to defend and fight for the proposed program is still weak or not yet optimal. Based on these results concluded that women's participation in the formulation of economic policy in the institutional area of Lampung regency was still low.

Key words: *Women's Participation, Policy Formulation, Economic Development*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia telah diyakini sebagai suatu perubahan paradigma yang bertujuan menciptakan iklim demokratis dan keterbukaan di dalam sistem pemerintahan maupun pembangunan daerah. Tumbuh dan berkembangnya keterbukaan ruang publik dalam setiap tatanan kehidupan masyarakat daerah adalah terinspirasi dari lahirnya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yang pada akhirnya menjadi muara bagi menguatnya isu demokratisasi di segala bidang terutama berkaitan dengan hak-hak hidup setiap individu dalam sistem sosial di daerah. Lebih lanjut otonomi daerah dan penguatan arus keterbukaan semakin memberikan kesempatan kepada setiap individu baik laki-laki maupun perempuan sehingga dapat menempatkan dirinya pada posisi yang sama dalam memberikan peran pada proses pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Hakekatnya pembangunan daerah harus didukung oleh berbagai sistem dan elemen agar pelaksanaannya dapat berkesinambungan dan menyeluruh menyentuh seluruh kepentingan ataupun hak-hak setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan. Penyelenggaraan pembangunan daerah itu sendiri tentunya membutuhkan dana, sumber daya alam, sarana dan fasilitas maupun sumber daya manusia itu sendiri. Dan dari berbagai aspek pendukung pembangunan sebagaimana dimaksud, faktor manusia atau sering disebut dengan sumber daya manusia masih memegang fungsi utama dan sangat vital.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi daya-sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, dominasi pelaku pembangunan atau sebagai subyek pembangunan tidaklah semata-mata berada pada kaum laki-laki. Perempuan juga merupakan suatu aspek sumber daya yang potensial bilamana keberadaannya diberdayakan secara optimal. Begitu pula dari sejarah perkembangan dunia maupun perkembangan bangsa telah membuktikan bahwa kaum perempuan mampu memiliki peran dan fungsi dalam berbagai bidang kehidupan sebagaimana layaknya laki-laki.

Keterwakilan perempuan di kelembagaan daerah di setiap Kabupaten/Kota dewasa ini relatif cukup besar. Oleh karena itu keberadaan kaum perempuan pada setiap perangkat kerja pemerintahan daerah diharapkan mampu juga sebagai pelopor dalam perwujudan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) terutama dalam meningkatkan peran perempuan dibidang pemerintahan dan pembangunan yang selama ini dianggap bukan sebagai persoalan penting. Pada konteks perumusan kebijakan daerah terutama menyangkut pembangunan daerah, diskriminasi gender seringkali dilanggengkan oleh para pembuat kebijakan, dimana keputusan-keputusan dibuat kurang berprespektif gender. Keberadaan kaum perempuan yang minoritas pada suatu lembaga pemerintahan seringkali kalah mengimplikasikan suaranya dalam perumusan kebijakan. Kondisi ini tentunya harus menjadi sebuah dorongan bagi setiap kaum perempuan menempatkan diri dan memiliki peran serta fungsi dalam berbagai bidang kehidupan sebagaimana layaknya laki-laki, karena pada situasi dan tingkatan tertentu kaum perempuan memiliki pengetahuan, ketarampilan/kecakapan serta ketegasan yang sama dengan laki-laki.

Seiring dengan semakin banyaknya perempuan yang melibatkan diri dalam aktivitas sosial, dalam kelembagaan pemerintah, organisasi formal maupun organisasi non formal dan pada sektor swasta dalam kewirausahaan, peran perempuan ditengah-tengah kehidupan sosial dewasa ini tidak hanya sebagai alat produksi dalam melahirkan generasi penerus sebagaimana kodrat hakiki yang dimiliki kaum perempuan. Lebih dari pada itu perempuan dengan kodrat alamiahnya telah mampu pula menempanykan diri sebagai asset bangsa/daerah dan asset pembangunan, dimana kemampuan dan perannya dapat disejajarkan dengan kaum laki-laki. Berdasarkan hasil survey BPS Provinsi Lampung Tahun 2011 bahwa untuk jumlah perempuan di Kabupaten Lampung Tengah adalah

berkisar 41,7% dari jumlah penduduk laki-laki. Melihat besarnya jumlah penduduk perempuan tersebut tentunya akan menjadi asset pembangunan daerah yang besar apabila keberadaannya dimanfaatkan secara baik dalam mendorong laju pembangunan di daerah tersebut.

Akibat dari peningkatan berbagai macam kebutuhan dalam kehidupan serta modernisasi juga akibat pergeseran nilai adat istiadat primordial yang mengikat hak-hak dan ruang gerak kaum perempuan), peran perempuan di Kabupaten Lampung Tengah tidak lagi semata-mata sebagai pelayan bagi suami dan mengurus rumah tangga. Perempuan di daerah tersebut dengan keberadaannya telah ikut serta menunjukkan kapasitas dirinya dalam berperan di berbagai bidang, termasuk dalam kelembagaan pemerintahan di daerah. Hal ini tampak pada komposisi jumlah perempuan yang keberadaannya di lembaga pemerintahan hampir sama atau sebanding dengan jumlah laki-laki, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Data Komposisi (Jumlah) Tenaga Kerja (Pegawai) Wanita Pada Kelembagaan Daerah (Satker) Kabupaten Lampung Tengah.

No	Nama Kantor/Satuan Kerja	%			Jumlah Total
		Laki	Wanita	% Wanita	
1	Setda Kabupaten Lamteng	138	98	41,5	236
2	Badan Kepegawaian Daerah	54	43	43,9	98
3	Dinas Pendidikan	118	47	37,6	125
4	Dinas Kesehatan	47	56	54,4	103
5	Dinas Pendapatan Daerah	101	39	27,9	140
6	Dinas Pertambangan & Energi	58	27	31,8	85
7	Dinas Pemuda, Olahraga dan Parawisata.	53	23	30,3	76
8	Dinas Perternakan	56	37	39,8	93
9	Dinas Pasar dan Perdagangan	56	31	35,6	87
10	Dinas Pertanian dan Hortikultura	68	38	35,8	106
11	Dinas Pedudukan dan Catatan Sipil	105	40	27,6	145
12	BPPP dan Keluarga Berencana	51	37	42,1	88
13	DP2KA	77	31	28,7	108
14	Badan Pemberdayaan Kampung	69	34	33,0	103
15	Dinas Koperasi dan UKM	71	28	28,3	99
16	Badan penanggulangan Bencana	92	16	14,8	108
17	Kantor Kesbanglinmas	67	31	31,6	98
18	Badan Pelayanan Terpadu	64	23	26,4	87
19	Kantor Satpol- PP	168	69	29,1	237
20	Kecamatan (28 Kecamatan) + UPTD	7.908	4.992	39,0	12.800
	Jumlah	9.421	5.740	37,86	15.161

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan tabel di atas komposisi jumlah pegawai perempuan (wanita) di kelembagaan daerah Kabupaten Lampung Tengah adalah cukup besar yakni sebanyak 5.740 pegawai wanita atau 37,86% dari keseluruhan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Satuan Kerja (Satker) dan Sekretariat Pemda Kabupaten Lampung Tengah. Dengan jumlah yang relatif cukup besar ini tentunya wanita di kelembagaan pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah merupakan suatu asset pemerintahan dan pembangunan sekaligus memberikan peran serta dalam perumusan kebijakan. Namun demikian untuk berperan sebagai perumus kebijakan pemerintahan daerah, pegawai perempuan harus berada pada posisi yang memungkinkannya sebagai perumus kebijakan, misalnya berkedudukan sebagai Kepala Satuan Kerja (Eselon II), Kepala Bagian atau Kepala Bidang (Eselon III), atau berkedudukan sebagai Kepala Sub Bidang/Sub Bagian/Kepala Seksi

(Eselon IV), yakni pada level pimpinan dimana melekat padanya suatu fungsi sebagai perumus atau pengambil keputusan suatu kebijakan dalam kegiatan pemerintahan di daerah.

Di balik berbagai potensi dan kekuatan yang ada pada diri perempuan, marginalisasi dan subordinasi terhadap kaum perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (posisi dan aktivitasnya) masih dirasakan membatasi ruang gerak perempuan. Pandangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ternyata masih banyak menyisakan sikap pesimis terhadap kemampuan wanita. Anggapan bahwa wanita itu irrasional atau emosional menjadikan alasan bagi kaum pria beranggapan bahwa tidak mungkin seorang perempuan untuk tampil sebagai pimpinan. Kondisi ini tentunya menempatkan perempuan pada suatu posisi yang tidak penting. Pada akhirnya subordinasi gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk dan berbeda-beda dari tempat dan waktu yang berbeda pula.

Sesuai dengan kodrat alamiah yang dimilikinya, perempuan masih dianggap memiliki keterbatasan gender dibanding laki-laki. Oleh sebab itu posisi perempuan di berbagai bidang, khususnya di kelembagaan daerah masih belum sepenuhnya disetarakan dengan laki-laki. Kondisi tersebut terjadi pula di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Keberadaan perempuan di kelembagaan daerah dengan tingkat kualitas dan kuantitasnya yang ada belum mampu menempatkan wanita pada posisi yang sama dengan laki-laki. Sebagian besar yang memangku jabatan pada unit dan instansi pemerintahan adalah kaum laki-laki dan hanya sedikit perempuan yang diberikan kesempatan atau kepercayaan untuk duduk sebagai pimpinan pada tingkat eselon atau satuan kerja tertentu, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Komposisi (Jumlah) Tenaga Kerja (Pegawai) Wanita dalam Tingkatan Jabatan (Eselon) Di Kelembagaan Daerah (Satuan Kerja Daerah) Kabupaten Lampung Tengah.

No	Tingkatan Eselon Jabatan/Kepangkatan	Jumlah Pemegang Eselon			Jumlah Total
		Laki	Wanita	% wanita	
1	Eselon II	20	1	4,7	21
2	Eselon III	113	17	13,1	130
3	Eselon IV	316	79	20,0	395
	Jumlah	449	97	17,8	546

Sumber: Badan Kepagawain Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa komposisi pegawai perempuan yang berkedudukan sebagai pemegang (pimpinan) Eselon pada Satuan Kerja dan Pemda Kabupaten Lampung Tengah relatif kecil (rendah). Pada tingkat Eselon II (Kepala Dinas/Badan/Kantor) hanya terdapat satu 1 orang (4,7%) dari 21 Satuan Kerja yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Perempuan yang memiliki jabatan pada level Eselon III adalah sebanyak 17 orang (13,1%) dari 130 formasi jabatan. Sedangkan pegawai perempuan yang memegang jabatan pada Eselon IV adalah sebanyak 79 orang (20%) dari 316 formasi. Rata-rata ratio persentase pegawai perempuan yang memegang jabatan atau sebagai pucuk pimpinan dari berbagai tingkatan jabatan (Eselon) yang ada di Kabupaten Lampung Tengah hanya sebesar 17,8% dari keseluruhan formasi jabatan yang ada, dan inipun lebih banyak pada posisi jabatan (Eselon) ditingkat *lower* (pimpinan tingkat bawah/rendah) yakni pada Eselon IV.

Walaupun terlihat bahwa pegawai perempuan di lingkup Pemda Kabupaten Lampung Tengah telah dianggap memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam jabatan kelembagaan, akan tetapi porsi mereka masih sedikit dan tidak seimbang dengan posisi pegawai laki-laki. Kondisi ini tentunya akan membatasi ruang gerak pegawai perempuan dalam melibatkan diri sekaligus mempengaruhi hasil kebijakan daerah dibidang pemerintahan dan pembangunan. Keterbatasan perempuan dalam kedudukannya sebagai penentu utama keputusan/kebijakan pada suatu satuan kerja tentu saja menyebabkan suara perempuan dalam suatu kebijakan menjadi relatif kecil. Pada

akhirnya kaum perempuan di kelembagaan daerah Kabupaten Lampung Tengah lebih sebagai obyek dari kebijakan dan belum mampu menempatkan dirinya sebagai subjek suatu kebijakan.

Sebagai aplikasi gender penyelenggaraan pemerintahan daerah, peran perempuan dengan berbagai potensi yang dimilikinya harus lebih ditingkatkan. Pengarustamaan gender dalam konteks pemerintahan dan pembangunan daerah sebaiknya diiringi pula oleh peran perempuan dalam proses perumusan kebijakan daerah. Konsekwensinya perempuan harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dilibatkan dan dipercaya untuk memangku jabatan sebagai pimpinan di kelembagaan daerah. Namun demikian permasalahannya adalah bahwa komposisi keterlibatan perempuan di kelembagaan daerah relatif masih di tingkat bawah (staf) yang tidak memiliki peran utuh dalam pengambilan keputusan (kebijakan), selain itu persentase kepemimpinan perempuan di lingkungan kelembagaan daerah tersebut relatif masih kecil atau sedikit.

1.2 Permasalahan

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa partisipasi dan peran perempuan dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi di kelembagaan daerah masih rendah?
2. Sejauhmanakah partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah?

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Mardalis (2003:26) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada saat ini dan melihat kaitan antara faktor-faktor yang ada. Penelitian deskriptif mencoba memetakan dan mengklasifikasikan informasi yang didapat menjadi suatu bentuk penyajian yang sistematis mengenai suatu permasalahan.

Penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat atau keadaan pada subyek penelitian/sumber informasi, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian. Kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi subyek penelitian berperilaku (berfikir, berperasaan dan bertindak) seperti itu, kemudian data dan informasi yang diperoleh direduksi, diverifikasi dan disimpulkan (Usman dan Akbar, 2008:130).

Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Wawancara intensif;
Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data dengan bertanya langsung kepada informan. Teknik ini dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan sumber data berdasarkan daftar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.
- b. Studi Dokumen;
Studi dokumen dilakukan dengan meneliti dan melihat keadaan di lapangan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti.

Dengan mengfokuskan kepada beberapa aspek penelitian sebagai berikut:

1. Kemampuan perempuan menanggapi usulan dari masyarakat mengenai usulan kegiatan, usulan pendanaan dan usulan program di kelembagaan daerah.
2. Kemampuan perempuan menanggapi usulan dari bawah mengenai usulan kegiatan, usulan pendanaan dan usulan program di kelembagaan daerah.
3. Kemampuan perempuan membuat usulan untuk kegiatan, pendanaan dan usulan program di kelembagaan daerah.
4. Kemampuan perempuan dalam mempertahankan atau memperjuangkan usulan-usulan yang diajukan di kelembagaan daerah.

Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai perempuan yang menduduki jabatan Eselon II, III dan IV pada Kelembagaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 97 orang, yaitu: perangkat/satuan kerja Pemda Kabupaten Lampung Tengah. Mengingat begitu besarnya jumlah populasi maka peneliti membatasi Satuan Kerja yang ada di Kabupaten Lampung Tengah yang akan dijadikan sampel hanya sebanyak 4 (empat) Satuan Kerja diantaranya : Bappeda Kabupaten Lampung Tengah, Badan KB, Pemberdayaan Perempuan dan PA, Badan Pemberdayaan Kampung dan Dinas Koperasi dan UKM, dengan jumlah nara sumber sebanyak 6 orang perempuan yang menjabat sebagai pimpinan pada unit kerja: 2 orang pejabat Eselon II, 2 orang Pejabat Eselon III, dan 2 orang Pejabat Eselon IV.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda Wilayah Kabupaten Lampung Tengah merupakan *Onder Afdeling* Sukadana, bagian dari Keresidenan Lampung (*Residentie Lampongshe Districten*). *Onder Afdeling* ini dikepalai oleh seorang *Controleur* berkebangsaan Belanda dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Bangsa Indonesia sebagai Kepala *District*.

District Sukadana terbagi dalam *Onder District* yaitu: *Onder District* Sukadana, *Onder District* Labuhan Maringgai dan *Onder District* Gunung Sugih. Masing-masing *Onder District* dikepalai oleh *Assisten* Demang yang berkedudukan sebagai Pembantu Demang yang mengkoordinir marga-marga. Masing-masing *Onder District* terdiri dari empat marga yang dikepalai seorang Pesirah.

Pada zaman Pemerintahan Jepang, *Residentie Lampongshe Districten* oleh Jepang dirubah menjadi *Lampung Shu* yang dibagi menjadi tiga *Shu*, yaitu: *Bun Shu* Teluk Betung, *Bun Shu* Metro dan *Bun Shu* Kota Bui. Wilayah Kabupaten Lampung Tengah waktu itu termasuk *Bun Shu* Metro yang terdiri dari *Gun Shu*. Marga-marga dan kampung-kampung *Bun Shu* dikepalai oleh *Bun Shu Cho*, *Gun Shu* dikepalai oleh *Gun Shu Cho*, Marga dikepalai oleh Marga *Cho* dan Kampung dikepalai oleh seorang Kepala Kampung.

Setelah Indonesia merdeka dan dengan berlakunya Peraturan Peralihan Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945, maka *Bun Shu* Metro berubah menjadi Kabupaten Lampung Tengah yang dikepalai oleh seorang Bupati. Sejalan dengan upaya pemekaran wilayah dan daerah serta untuk lebih mengefektifkan rentang kendali (*Span Of Control*) terhadap pelaksanaan jalannya roda pemerintahan di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, maka pada Tahun 1986 telah dirintis pembentukan dua wilayah Pembantu Bupati, yaitu Wilayah Sukadana dan Wilayah Gunung Sugih. Pada tahun 1987 dibentuk pula Kota Administratif Metro dengan pusat pemerintahan di Metro.

4.2 Analisis Teoritis Partisipasi Perempuan dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Kelembagaan Daerah.

Pembangunan adalah suatu usaha yang terencana dalam rangka memberikan perubahan yang lebih baik dan kesejahteraan dimasa yang akan datang. Batasan menunjukkan makna bahwa aktivitas pembangunan ekonomi regional memiliki suatu tujuan yaitu berupaya mengurangi kemiskinan. Kemiskinan itu sendiri dilihat sebagai cara hidup yang ditandai oleh konsumsi kalori yang rendah, tidak mempunyai akses terhadap fasilitas kesehatan, tingkat kualitas pendidikan yang rendah, tidak mempunyai akses terhadap fasilitas perumahan dan fasilitas sosial lain.

Secara umum kemiskinan dapat dilihat dari kekurangan materi, pendidikan dan kesehatan yang rendah, kerentanan orang miskin terhadap berbagai resiko, dan tidak mempunyai kekuatan terhadap terpaan guncangan ekonomi makro. Disinilah pemerintah daerah mampu melakukan berbagai upaya melalui berbagai program dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan di daerahnya melalui pembangunan menyeluruh dalam berbagai sektor ekonomi masyarakat dan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah saat ini menggunakan kerangka pikir yang lebih modernisasi dalam pembangunan ekonomi, dimana pembangunan ekonomi daerah

identik dengan proses industrialisasi. Sektor industri dilihat sebagai motor yang akan menggerakkan perekonomian di Kabupaten Lampung Tengah karena pembangunan industri diyakini akan mempunyai efek multiplier terhadap sektor lain di Kabupaten Lampung Tengah.

Kelembagaan Daerah di Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu pilar bagi terlaksana program pembangunan ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah. Satuan Kerja dengan tugas dan fungsinya merupakan organisasi kelembagaan daerah yang diberikan tugas dan kewenangan melaksanakan secara langsung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Oleh sebab itu keberhasilan pembangunan ekonomi daerah salah satunya dipengaruhi oleh kemampuan kelembagaan daerah dalam merumuskan kebijakan yang baik dan tepat dalam penyusunan rancangan pembangunan ekonomi daerah sesuai bidang tugas, fungsi dan kewenangan lembaga yang bersangkutan.

Keberhasilan perumusan kebijakan pembangunan ekonomi oleh kelembagaan daerah tentunya tidak lepas dari kemampuan sumber daya manusia laki-laki maupun perempuan yang dimiliki oleh kelembagaan daerah dalam menjalankan fungsi kelembagaannya. Sumber daya laki-laki maupun perempuan merupakan aset lembaga dan aset daerah yang harus dimanfaatkan secara optimal dengan tuhas, fungsi, kewenangan sekaligus kewajiban yang sama untuk meningkatkan peran dan partisipasinya dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan ekonomi di setiap kelembagaan daerah.

Dipandang perlu peningkatan peran dan kesamaan hak, kedudukan serta fungsi antara laki-laki dan perempuan dalam perumusan kebijakan ekonomi di kelembagaan daerah di kabupaten Lampung Tengah, hakikatnya didasari oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Bahwa perempuan di kelembagaan daerah secara kuantitas memiliki jumlah yang hampir sebanding dengan sumber daya laki-laki.
- b. Bahwa perempuan di kelembagaan daerah tidak memiliki kemampuan yang lebih rendah daripada laki-laki bahkan dapat dikatakan hampir sama dengan laki-laki, baik dalam tingkat pendidikan, pengetahuan dan kemampuan kerja, kecakapan dan keterampilan, daya pikir dan wawasan.
- c. Bahwa perempuan di kelembagaan daerah Kabupaten Lampung Tengah telah mampu memerankan peran gandanya sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai administrator pemerintahan dilembaga tempatnya bekerja, dimana hal ini sebenarnya belum tentu dapat dilakukan secara baik oleh laki-laki.
- d. Bahwa sampai saat ini kesetaraan perempuan dan laki-laki belum terwujud kelembagaan daerah Kabupaten Lampung Tengah, dimana komposisi sumber daya perempuan masih sangat sedikit dan terbatas yang memiliki kedudukan serta otoritas sebagai perumus/penentu kebijakan di kelembagaan daerah karena jumlah pejabat perempuan dalam berbagai level Eselon ternyata masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Lampung Tengah dapat dijelaskan bahwa belum terlaksananya kesamaan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan daerah di Kabupaten Lampung Tengah. Pengarustamaan gender dalam pembangunan daerah sebagaimana yang dicanangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah belum sepenuhnya berjalan baik di kelembagaan daerah.

Kenyataan yang ada di lapangan terkait dengan perumusan kebijakan ekonomi di kelembagaan daerah masih didominasi oleh kaum laki-laki. Hampir disemua kelembagaan daerah di Kabupaten Lampung Tengah, perempuan yang memiliki jabatan strategis sebagai penentu kebijakan dalam satuan kerja relatif masih sedikit. Sampai saat ini faktor rendahnya tingkat pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman perempuan dibidang publik khususnya dibidang pembangunan ekonomi daerah telah melemahkan tingkat partisipasi dan kepercayaan diri perempuan untuk terlibat aktif dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi di kelembagaan daerah. Selain itu rendahnya komposisi perempuan dalam jabatan pimpinan di kelembagaan daerah tentu mempengaruhi otoritas perempuan sebagai penentu sebuah kebijakan, atau pihak yang dapat

mempengaruhi suatu kebijakan. Kondisi demikian menyebabkan partisipasi perempuan dalam kebijakan pembangunan ekonomi daerah belum berjalan baik karena masih pada level pendukung penyelenggaraan kebijakan dan bukan sebagai berada pada posisi sebagai penentu kebijakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ternyata perempuan di struktur kelembagaan daerah belum memiliki akses luas dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi di kelembagaan daerah. Secara umum kemampuan pimpinan perempuan dalam menilai dan memecahkan masalah, dalam menanggapi usulan kegiatan pembangunan yang berasal dari masyarakat maupun bawahan relatif belum sepenuhnya baik. Begitu pula dalam hal pengelolaan anggaran kegiatan satuan kerja, pengusulan rancangan kegiatan dan anggarannya kepada pimpinan Satuan Kerja belum sepenuhnya dilaksanakan perempuan secara baik.

Secara umum partisipasi perempuan dalam memutuskan suatu kebijakan pembangunan ekonomi di kelembagaan daerah relatif masih lemah atau kurang. Terbatasnya jumlah sumber daya perempuan yang berkedudukan sebagai pimpinan dalam struktur kelembagaan daerah telah mempersempit ruang dan gerak perempuan untuk berpartisipasi secara optimal dalam perumusan kebijakan. Dominasi kaum laki-laki yang berperan sebagai pimpinan satuan kerja atau kelembagaan daerah menyebabkan keterlibatan perempuan dalam perumusan kebijakan di kelembagaan daerah lebih kepada persoalan teknis saja. Pada tatanan sebagai perumus kebijakan, perempuan di kelembagaan daerah belum mampu berbuat banyak karena aksesnya untuk mempertahankan, memperjuangkan, dan mempengaruhi keputusan dalam kebijakan relatif masih rendah/lemah. Walaupun tingkat pendidikan perempuan yang bekerja di kelembagaan daerah relatif cukup baik, namun pengetahuan, pengalaman dan kemampuan perempuan dalam bidang penyelenggaraan dan pengelolaan kebijakan pembangunan ekonomi daerah relatif lemah/kurang. Kondisi ini pula yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan diri perempuan untuk terlibat aktif lebih aktif dalam kebijakan pembangunan daerah, baik pada saat menanggapi usulan kebijakan dari bawah (masyarakat), pada saat musyawarah perumusan kebijakan pembangunan, maupun dalam penetapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi oleh kelembagaan daerah di Kabupaten Lampung Tengah.

Kondisi ini menunjukkan adanya implikasi bahwa kesamaan hak dan kedudukan perempuan dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi di kelembagaan daerah Kabupaten Lampung Tengah belum seimbang. Dan dominasi yang besar oleh kaum laki-laki dalam jabatan struktural kelembagaan daerah, selain mempersempit akses perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dan optimal, juga telah membatasi akses perempuan hingga tidak memiliki otoritas yang cukup kuat dalam hal memutuskan kebijakan program pembangunan ekonomi di kelembagaan daerah Kabupaten Lampung Tengah.

5. KESIMPULAN

1. Kemampuan dan partisipasi perempuan dalam merespon usulan masyarakat dalam pembangunan ekonomi pada kelembagaan daerah di Kabupaten Lampung Tengah masih relatif lemah. Kurangnya akses keterlibatan perempuan dalam perumusan program disebabkan oleh faktor masih rendahnya komposisi perempuan pada tingkat jabatan struktural yang ada di kelembagaan daerah, kurangnya pengetahuan, pengalaman dan kemampuan perempuan dalam akses perumusan program, penetapan program dan pelaksanaan program pembangunan ekonomi di kelembagaan daerah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Kemampuan perempuan dalam menanggapi usulan bawahan mengenai program dan anggaran pembiayaan dalam pembangunan ekonomi di kelembagaan daerah Kabupaten Lampung Tengah relatif masih lemah. Dominasi kaum laki-laki pada tingkatan jabatan struktural kelembagaan daerah mengakibatkan perempuan kurang memiliki ruang dan gerak yang luas untuk mempengaruhi penetapan kebijakan rumusan program pembangunan ekonomi oleh Satuan Kerja di Kabupaten Lampung Tengah.

3. Walaupun tingkat pendidikan, keterampilan dan kecakapan perempuan selaku pimpinan pada struktur pemerintahan dan perumus/perancang usulan kegiatan/program tidak lebih rendah dari kaum laki-laki, akan tetapi keterbatasan akses perempuan menanggapi usulan, merumuskan program kebijakan dan menentukan kebijakan yang diputuskan, menyebabkan usulan kegiatan terkadang tidak berjalan, dan sumber daya perempuan di kelembagaan daerah seperti lebih ditempatkan sebagai alat pendukung dari kegiatan perumusan kebijakan pada suatu Satuan Kerja.
4. Sampai saat ini kaum perempuan belum sepenuhnya mampu menempatkan diri untuk berpartisipasi secara aktif dalam perumusan kebijakan Kelembagaan Daerah dibidang pembangunan ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah. Selain kurangnya pengetahuan, kemampuan dan pengalaman perempuan di kelembagaan daerah dalam hal pembangunan ekonomi daerah, masih rendahnya komposisi kaum perempuan pada jabatan struktural di kelembagaan daerah ternyata membatasi akses kemampuan, kewenangan dan kekuasaan perempuan untuk mempengaruhi keputusan dalam perumusan kebijakan yang diusulkan. Akibatnya kemampuan kaum perempuan untuk mempertahankan dan memperjuangkan program yang diusulkan menjadi kurang optimal. Dan dominasi kaum laki-laki sebagai pemegang jabatan struktural ternyata ikut berperan dalam melemahkan ruang dan gerak bagi perempuan untuk mampu berpartisipasi lebih aktif dan dinamis dalam menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi di kelembagaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung., 2007, *Statistik Jender dan Analisis Provinsi Lampung Tahun 2006*: Lampung.
- Cholil Abdullah., 2000, *Isu Gender dalam Pembangunan di Indonesia (Buku Fakta; Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI dan United Nation Population Fund (UNFPA):*Jakarta.
- Corner, L. (1997). "*Rural development and Poverty Alleviation in ASEAN, a Gender*, diterjemahkan oleh Sutopo Bahri: Jakarta.
- Entis dkk., 1999, *Metodologi Penelitian*, Unsri:Palembang.
- Hardjito Notopuro., 1979, *Peranan Wanita dalam Masa Pembangunan di Indonesia*, Ghalia Indonesia:Jakarta.
- Instruksi Presiden RI., 1995, *Tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Didaerah*:Jakarta.
- Ihromi., 1994, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, Gajah Mada Universitas Press:Yogyakarta.
- Koentjaraningrat., 1993, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia:Jakarta.
- Liza Hadiz., 2004, *Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru*, LP3ES: Jakarta.
- Mansour Fakh., 2003, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, *Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah*: Jakarta.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun Tahunn 2011, *Tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah*: Lampung.

Sa'id Al-Afghani., 2001, *Pimpinan Wanita Di Kancah Politik*, Pustaka Pelajar LP2EF: Surabaya.

Singarimbun dan Effendi., 2003, *Metode Penelitian Survei*; LP3ES:Yogyakarta.

Sutrisno Hadi., 1986, *Metodologi Research*. Penerbit Fakultas Psykologi UGM:Yogyakarta.